

# ANALISIS KESENJANGAN PENGUKURAN ASET BIOLOGIS ANTARA KEPMENDESAA 136/2022 DAN PSAK 241 PADA BADAN USAHA MILIK DESA: PERBANDINGAN *HISTORICAL COST* DAN *FAIR VALUE MEASUREMENT*

Difi Aqila Febriansyah<sup>1</sup>; Muhamad Rafy Khairu<sup>2</sup>; Rosmaria Anggelina Simanjuntak<sup>3</sup>; Zaza Dhina Tri Pamungkas<sup>4</sup>

Politeknik Keuangan Negara STAN  
Jl. Bintaro Utama Sektor V Bintaro Jaya Tangerang Selatan  
E-mail : [humas.baak@pknstan.ac.id](mailto:humas.baak@pknstan.ac.id) (Koresponding)

**Abstract:** This study aims to analyze the normative gap between Kepmendesaa 136/2022 (SAK ETAP historical cost approach) and PSAK 241 (fair value biological assets approach) and its impact on BUMDes financial reporting quality. Data were obtained through regulatory review, BUMDes financial statements, and quantitative simulation of biological asset growth/crisis scenarios. Analysis employed a comparative regulatory approach and financial impact simulation (Tables 1-4). The analysis reveals asset undervaluation, ROA distortion, extreme current ratios, and reduced information relevance due to the historical cost approach's failure to reflect biological asset value dynamics (biological transformation). This research enriches academic literature through specific comparative regulatory analysis between Kepmendesaa 136/2022 (SAK ETAP historical approach) and PSAK 241 (fair value approach) for BUMDes biological assets, implying the need for BUMDes accounting regulation adjustment by adopting PSAK 241 to align with the economic substance of biological assets.

**Keywords:** *Biological Assets; Kepmendesaa 136/2022; PSAK 241; Historical Cost Approach; Fair Value; Gap Analysis*

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, hadir memainkan peran strategis dalam pengembangan ekonomi pedesaan melalui pengelolaan potensi lokal (Budiaman et al. 2021). Kemendes PDT mencatat pertumbuhan signifikan jumlah BUMDes dari 47.500 entitas pada 2021 menjadi 70.985 pada Desember 2025. Peningkatan ini mencerminkan komitmen konkret pemerintah Indonesia dalam pembangunan ekonomi desa melalui alokasi dana desa dari APBN 2025 sebesar Rp71 triliun, dengan 20% diwajibkan untuk mengoptimalkan peran BUMDes (Mendes PDT, 2025).

Pendataan potensi desa tahun 2024 oleh BPS menunjukkan bahwa 90,03% (66.002) desa/kelurahan bergantung pada pertanian, kehutanan dan perikanan. Sehingga aset biologis seperti ternak perah, tanaman tahunan, dan tanaman semusim mendominasi operasional BUMDes. Aset ini bersifat dinamis akibat transformasi

biologis (pertumbuhan, produksi, perkembangbiakan), berbeda dari aset tetap konvensional.

Kepmendesa 136/2022 mewajibkan SAK ETAP yang mengklasifikasikan ternak dan tanaman sebagai aset tetap konvensional dengan *historical cost* dan penyusutan garis lurus serta tidak mengakomodasi fluktuasi nilai pasar. Pendekatan ini bertentangan dengan PSAK 241 yang menggunakan *fair value*. Kesenjangan ini menciptakan ambiguitas akuntansi dan berpotensi menghasilkan: (1) perlakuan inkonsistensi pelaporan dan merusak komparabilitas laporan keuangan antar-entitas (Suningsih dkk,2020); (2) relevansi informasi berkurang karena tidak mencerminkan nilai ekonomi sebenarnya saat periode pelaporan (Setiawan, A. H. 2016); (3) kegunaan keputusan untuk pemangku kepentingan desa berkurang (Sonbay, A. 2018).

Penelitian terdahulu mengungkap berbagai ketidaksesuaian akuntansi aset

biologis. Ningsih (2025) menemukan Safwana Koi Farm gagal mencatat kematian aset biologis sesuai PSAK 241. Putra (2023) menyoroti BUMDes Sumber Rezeki yang hanya membuat neraca dan laba rugi parsial memakai SAK ETAP serta mengabaikan arus kas dan *fair value* ayam petelur. Putri et al. menunjukkan PT Dewi Sri mengukur tanaman kopi dengan biaya perolehan, bukan nilai wajar PSAK 69. Rahmani dkk (2021) bedah perbedaan PSAK 16 vs PSAK 69 di agrikultur, sementara Wiratno (2021) di UKM kopi menemukan praktik *historical cost* dominan karena pasar lemah sehingga laporan gagal mencerminkan nilai ekonomi aset.

Literatur penelitian yang membahas tentang implementasi akuntansi aset biologis dalam konteks BUMDes Indonesia sangat terbatas, apalagi untuk analisis komparatif standar akuntansi yang membedah perbedaan pendekatan Kepmendesa 136/2022 (SAK ETAP) dan PSAK 241 beserta dampak kuantitatif seperti ROA atau *early warning*.

Penelitian ini menganalisis kesenjangan regulasi antara Kepmendesa 136/2022 (*historical cost* SAK ETAP) dan PSAK 241 (*fair value* aset biologis) yang memengaruhi *signaling* laporan keuangan BUMDes dan menghambat akses pembiayaan. Penelitian ini juga mengurai empat gap analisis utama: (1) perbedaan basis pengukuran (*historical cost* vs. *fair value*), (2) perbedaan klasifikasi neraca dan struktur pelaporan (aset tetap vs. aset biologis terpisah), (3) *timing* pengakuan perubahan nilai biologis (realisasi saat panen vs. periodik transformasi biologis), dan (4) perbedaan persyaratan pengungkapan melalui analisis komparatif regulasi dan simulasi valuasi aset biologis. Penelitian ini mengimplikasikan perlunya penyesuaian regulasi akuntansi BUMDes (Kepmendesa 136/2022) dengan mengadaptasi PSAK 241 (*Fair value Less Costs to Sell (FVLCs) Approach*) agar selaras dengan substansi ekonomi aset biologis.

PSAK 241 merupakan perubahan penomoran dari PSAK 69 yang mengadopsi IAS 41, mengatur pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan aktivitas agrikultur terkait aset biologis. Aset biologis adalah tanaman atau hewan hidup yang mengalami transformasi biologis berupa perubahan kuantitatif dan kualitatif melalui proses pertumbuhan, produksi, degenerasi, dan prokreasi. Standar ini tidak mencakup tanaman produktif dan hasil pascapanen, melainkan produk yang dihasilkan. Aset diakui jika entitas memiliki kendali, manfaat ekonomi masa depan kemungkinan besar diperoleh, dan nilainya dapat diukur andal. Pengukuran dilakukan pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, kecuali jika tidak andal, maka digunakan biaya perolehan. Sementara itu, BUMDes mengacu pada Kepmendesa No. 136/2022 berbasis SAK ETAP yang menggunakan biaya historis. Perbedaan ini menyebabkan nilai aset, ROA, dan ISI BUMDes cenderung lebih rendah dibandingkan jika menggunakan PSAK 241, sehingga menimbulkan kesenjangan dalam pelaporan keuangan.

## METODE

penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, di mana penelitian ini menggunakan peraturan-peraturan tertulis sebagai sumber atau bahan penelitian yang akan dibandingkan dan diselaraskan untuk menjawab permasalahan. Penelitian normatif ini dapat dipahami sebagai metode untuk menguji suatu ketentuan atau norma yang berlaku dan penelitian yang dilakukan selaras dengan cara atasnya yaitu dengan meneliti atau menelaah bahan pustaka atas data sekunder (Irwansyah et al., 2020). Jenis penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data-data, teori, dan aturan-aturan yang berkaitan dengan perlakuan akuntansi atas aset biologis dengan cara mengutip, membaca, dan memahami literatur yang digunakan sebagai sumber atau bahan penelitian.

## HASIL

### Fundamental dalam Basis Pengukuran (*Historical cost versus Fair value*)

Kepmendesa 136/2022 berbasis SAK ETAP tidak mengatur jelas klasifikasi aset biologis, sehingga dapat diperlakukan sebagai persediaan atau aset tetap. Umumnya digunakan pendekatan aset tetap karena umur ekonomis panjang dan penyusutan. Pengukuran memakai biaya historis tanpa revaluasi interim, sehingga perubahan nilai tidak tercermin. Akibatnya, laporan keuangan berpotensi kurang relevan dibanding pendekatan nilai wajar PSAK 241.

Perlakuan akuntansi ini secara implisit dibangun di atas asumsi bahwa aset biologis berperilaku layaknya aset tetap seperti mesin atau bangunan di mana manfaat ekonominya mengalami penurunan secara terukur dan prediktibel (Kemendes PDPT, 2022). Padahal, dalam realitas ekonomi yang sesungguhnya, nilai aset biologis memiliki karakteristik dinamis: ia dapat mengalami apresiasi maupun depresiasi akibat proses transformasi biologis yang berkelanjutan serta volatilitas kondisi pasar (Alfarisyi, Diantimala, Yahya, & Saleh, 2022).

PSAK 241 menetapkan pengukuran aset biologis berbasis nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual (FVLCS). Aset dinilai ulang saat pengakuan awal dan setiap akhir periode, dengan perubahan nilai langsung diakui dalam laba rugi. Pendekatan ini meningkatkan relevansi, ketepatan waktu, dan transparansi informasi. Perubahan nilai dipengaruhi transformasi biologis dan fluktuasi harga pasar yang bersifat non-linear, sehingga tidak tepat diukur dengan biaya historis. Melalui revaluasi berkala, PSAK 241 menangkap dampak ekonomi secara komprehensif dan menyajikan kondisi agrikultur yang lebih realistis serta bermanfaat bagi pengambilan keputusan.

### *Technical Mechanism of Distortion*

Distorsi fundamental model biaya historis pada Kepmendesa 136/2022 berakar pada ketidakmampuannya merekam dinamika nilai aset biologis akibat transformasi biologis dan fluktuasi pasar, sehingga menghasilkan

laporan keuangan kurang relevan (Alfarisyi et al., 2022).

Gonçalves et al. (2017) menunjukkan bahwa pengukuran aset biologis berbasis nilai wajar memiliki relevansi lebih tinggi bagi investor dibanding biaya historis. Namun, Kepmendesa 136/2022 yang memakai pendekatan aset tetap dan penyusutan garis lurus keliru karena menganggap aset biologis mengalami keusangan, padahal nilainya bisa meningkat saat masa produktif. PSAK 241 memisahkan perubahan nilai menjadi faktor biologis dan harga pasar, serta mengakuinya secara periodik. Sebaliknya, metode biaya historis menunda pengakuan kenaikan nilai hingga realisasi, sehingga memicu distorsi laba dan volatilitas. PSAK 241 mengatasi hal ini dengan menyelaraskan pengakuan laba dengan perubahan ekonomi aktual. Studi Bohušová et al. (2017) menegaskan bahwa basis pengukuran memengaruhi distribusi laba, sehingga nilai wajar memberikan gambaran kinerja agrikultur yang lebih transparan dan berkelanjutan.

### Ilustrasi Dampak Kuantitatif pada Laporan Keuangan

Dalam skenario awal hipotesis, BUMDes X diasumsikan mengakuisisi 100 ekor sapi perah berkualitas tinggi pada Januari 2024 dengan harga Rp5 juta per ekor, sehingga total investasi tercatat sebesar Rp500 juta. Untuk menggambarkan dampak kuantitatif dari perbedaan dasar pengukuran tersebut, penelitian ini melakukan simulasi di mana harga pasar sapi perah sejenis diasumsikan meningkat sebesar 20% akibat perbaikan kualitas genetik. Selain itu, produktivitas biologis yang diprosikan melalui hasil susu diasumsikan mengalami kenaikan tambahan sebesar 8% selama tahun pertama, dengan estimasi sisa umur ekonomis kawanan selama enam tahun. Berdasarkan asumsi tersebut, gabungan kenaikan nilai sebesar 28% mengimplikasikan adanya proyeksi peningkatan nilai bersih sebesar Rp140 juta pada Tahun 1, yang dihitung dari 28% nilai

investasi awal Rp500 juta.

**Tabel 1. Simulasi dampak akibat selisih pencatatan Kepmendesa 136/2022 versus PSAK 241**

Metrik Keuangan	Kepmendesa 136/2022	PSAK 241	Selisih Pencatatan	Dampak
Aset Biologis (Saldo Awal Tahun)	Rp 500 Juta	Rp 500 Juta	-	-
Akumulasi Depresiasi (Tahun-1)	Rp 83.3 Juta	-	(Rp 83.3 Juta)	Carrying amount understated
Fair value Adjustment Gain	-	Rp 140 Juta	(Rp 140 Juta)	Unrecognized Holding Gains
Aset Biologis Bersih (Saldo Akhir Tahun)	Rp 416.7 Juta	Rp 640 Juta	Rp 223.3 Juta	Total Assets Materially Understated
Pengakuan Laba Bersih	(Rp 83.3 Juta) (Depreciation)	Rp 140 Juta (FV Gain)	(Rp 223.3 Juta)	Financial Performance Materially Misstated
Return on Assets (ROA)	12.3%	18.7%	+6.4 pp	Profitability Ratios Understated
Biological Assets % Total Assets	28.1%	42.7%	+14.6 pp	Economic Substance Misrepresented
Debt-to-Asset Ratio	0.65	0.52	(0.13)	Solvency risk overstated

Sumber : Hasil data olahan simulasi penulis

Asimetri pelaporan menjadi risiko saat terjadi krisis biologis, seperti banjir dan wabah yang menurunkan nilai aset hingga 40%. Dalam pendekatan biaya historis (Kepmendesa 136/2022), kondisi ini tidak tercermin karena entitas tetap mencatat penyusutan normal dan nilai buku relatif stabil, sehingga kerugian tersembunyi. Sebaliknya, PSAK 241 mewajibkan pengakuan kerugian secara langsung, memberikan transparansi meski meningkatkan volatilitas laba. Pendekatan ini berfungsi sebagai sistem peringatan dini yang memungkinkan intervensi lebih cepat. Studi Alfarisyi et al. (2022) menegaskan bahwa pengukuran nilai wajar meningkatkan relevansi dan kualitas informasi keuangan.

**Tabel 2. Simulasi Implikasi Manajerial % Strategis Kepmendesa 136/2022 versus PSAK 241**

Aspek Pelaporan	Kepmendesa 136/2022	PSAK 241	Implikasi Manajerial & Strategis

Pengakuan Dampak – Tahun- 1	Beban Penyusutan (Rp83,3 Juta)	Kerugian Penurunan Nilai (Rp200 Juta)	Timeliness: PSAK 241 mengungkap krisis secara sertamerta (immediately reveals crisis).
Nilai tercatat akhir tahun	Rp416,7 Juta (Overstated)	Rp300 Juta (Realizable Value)	Information Quality: Kepmendesa tidak memperlihatkan deteriorasi aset (mask deterioration)

Sumber : Hasil data olahan simulasi penulis

## Implikasi terhadap Dimensi Kualitas Pelaporan

### Dimensi Relevansi Informasi

Divergensi antara Kepmendesa 136/2022 dan PSAK 241 bukan sekadar perbedaan teknis, melainkan menciptakan implikasi material terhadap kualitas pelaporan keuangan BUMDes. Mengacu pada simulasi kuantitatif pada Tabel 1, kesenjangan regulasi ini mendegradasi relevansi nilai informasi aset sebesar 35%, merefleksikan selisih antara nilai riil ekonomi pada pendekatan nilai wajar (Rp640 juta) dan biaya historis (Rp416,7 juta). Kegagalan model biaya historis menangkap realitas ekonomi memicu distorsi melalui tiga saluran utama.

Kegagalan Penilaian (*Undervaluation*): Aset biologis yang disajikan berdasarkan biaya historis gagal mencerminkan substansi ekonomi yang sebenarnya. Temuan empiris Alfarisyi et al. (2022) menunjukkan bahwa *fair value measurement* aset biologis dan pengungkapan yang memadai memberikan sinyal lebih baik mengenai manfaat ekonomis masa depan dan memiliki keterkaitan yang lebih kuat dengan nilai serta kinerja perusahaan dibandingkan penggunaan biaya historis. Dengan mengabaikan kenaikan nilai ini hingga aset dijual, laporan keuangan BUMDes menyajikan nilai kekayaan yang terlalu rendah (*understated*).

Pengakuan nilai aset biologis saat penjualan menyebabkan keterlambatan informasi, sehingga laporan keuangan tidak mencerminkan kinerja aktual selama periode berjalan. Hal ini membuat pihak eksternal hanya melihat lonjakan nilai saat transaksi terjadi. Penelitian menunjukkan pengakuan

nilai wajar secara periodik meningkatkan relevansi dan ketepatan informasi (Gonçalves et al., 2017). Selain itu, penggunaan biaya historis menurunkan kegunaan keputusan karena nilai aset sering understated dan tidak mencerminkan potensi ekonomi (Campos Llerena et al., 2025). Studi lain juga membuktikan bahwa valuasi yang akurat meningkatkan nilai perusahaan (Alfarisyi et al., 2022), sedangkan penyajian rendah dapat menurunkan persepsi dan menghambat akses pembiayaan.

### Dimensi Akuntabilitas Pengurusan (*Stewardship Accountability*)

Dalam aspek pertanggungjawaban, penggunaan biaya historis pada Kepmendesa 136/2022 melemahkan efektivitas pengawasan karena tidak mencerminkan kondisi aset secara real time. Berdasarkan teori sinyal, manajer seharusnya menyampaikan informasi kinerja yang kredibel (Alfarisyi et al., 2022). Namun, pendekatan ini menimbulkan kinerja tersembunyi, karena penurunan kondisi biologis tidak langsung diakui (Gonçalves et al., 2017). Selain itu, sinyal peringatan menjadi terlambat karena perubahan nilai tidak segera dilaporkan. Sebaliknya, PSAK 241 melalui nilai wajar berfungsi sebagai sistem peringatan dini dengan mengungkap perubahan nilai aset secara periodik dan transparan.

### Disparitas Taksonomi dan Klasifikasi Aset Biologis

Dalam Kepmendesa 136/2022 berbasis SAK ETAP, aset biologis tidak diakui sebagai pos tersendiri, melainkan diklasifikasikan sebagai persediaan atau aset tetap tanpa label khusus (Baroroh et al., 2018). Hal ini menyamakan aset hidup dengan barang statis dan menerapkan penyusutan kaku, meski nilainya bisa meningkat saat fase pertumbuhan, sehingga menimbulkan inkonsistensi. Sebaliknya, PSAK 241 mengklasifikasikan aset biologis secara terpisah berdasarkan maturitas dan diukur pada nilai wajar. Pendekatan ini meningkatkan transparansi, keterbacaan, serta

relevansi informasi keuangan (Gonçalves et al., 2017; Campos Llerena et al., 2025).

### Variabilitas Praktik dan Distorsi Likuiditas: Tinjauan Literatur dan Simulasi

Ketiadaan pengaturan klasifikasi aset biologis dalam SAK ETAP menimbulkan variasi praktik, di mana sebagian entitas mengklasifikasikannya sebagai persediaan dan sebagian sebagai aset tetap meski karakteristiknya sama (Baroroh et al., 2018). Hal ini menyebabkan aset agrikultur tersebar di berbagai akun, sehingga informasi kapasitas produksi sulit ditelusuri secara konsisten (Campos Llerena et al., 2025). Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menyusun simulasi komparatif pada tiga BUMDes dengan profil ekonomi identik total aset Rp1,5 miliar dan aset biologis Rp450 juta untuk menilai dampak perbedaan perlakuan akuntansi terhadap rasio keuangan.

**Tabel 3. Simulasi Dampak Perbedaan Klasifikasi Aset Biologis terhadap Struktur Likuiditas BUMDes**

Komponen	BUMDes A	BUMDes B	BUMDes C
Kas	300	300	300
Aset biologis – lancar (sapi potong)	450	0	50
Aset lancar lain	0	0	0
Total aset lancar	750	300	350
Aset biologis – tidak lancar (sapi indukan)	0	450	400
Aset tetap/aset lain tidak lancar	750	750	750
Total aset tidak lancar	750	1.200	1.150
Total aset	1.500	1.500	1.500

**Sumber : Hasil data olahan simulasi penulis**

**Interpretasi fenomena :**

BUMDes A – Ilusi likuiditas: Seluruh aset biologis dimasukkan ke aset

lancar, sehingga total aset lancar tampak tinggi (Rp 750 juta) dan rasio likuiditas terlihat sangat kuat. Padahal sebagian besar sapi (indukan) tidak realistis untuk dijual dalam jangka pendek, sehingga profil likuiditas yang tercermin di neraca bersifat semu.

BUMDes B – Pembekuan aset: Semua sapi dicatat sebagai aset tidak lancar, sehingga aset lancar hanya tampak Rp 300 juta dan neraca terlihat kering likuiditas. Sapi potong siap jual yang secara ekonomi dapat segera dikonversi menjadi kas seolah “terkunci” di kelompok aset tetap, sehingga potensi arus kas masuk jangka pendek tidak tercermin.

BUMDes C – Mendekati substansi ekonomi (logika PSAK 241): Aset biologis dipisah sesuai fungsi: sapi potong (Rp 50 juta) sebagai lancar dan sapi indukan (Rp 400 juta) sebagai tidak lancar. Penyajian ini menunjukkan secara lebih wajar kombinasi kapasitas likuiditas jangka pendek dan basis produksi jangka panjang, sehingga mengurangi risiko ilusi likuiditas maupun pembekuan aset semu.

### Divergensi Metrik Keuangan yang Dipicu oleh Inkonsistensi Klasifikasi

Perbedaan klasifikasi aset biologis bukan sekadar administrasi, melainkan mendistorsi metrik keuangan krusial seperti current ratio, quick ratio, modal kerja bersih, dan intensitas aset tetap yang menjadi dasar keputusan kredit. Literatur empiris menunjukkan rasio likuiditas ini luas digunakan analis dan kreditur untuk menilai risiko gagal bayar, dengan perubahan current ratio berkorelasi signifikan terhadap probabilitas financial distress dan persetujuan pinjaman (Prakoso et al., 2024). Struktur aset padat modal juga sering diinterpretasikan sebagai fleksibilitas keuangan rendah, terutama jika aset jangka panjang sulit dilikuidasi cepat (Campos Llerena et al., 2025).

Dalam konteks aset biologis, cara pengukuran dan penyajian di neraca juga telah terbukti memengaruhi penilaian risiko dan nilai perusahaan. Penelitian relevansi nilai di bawah IFRS menemukan bahwa nilai aset

biologis yang diukur dengan *fair value* berkorelasi positif dan signifikan dengan nilai pasar ekuitas, yang berarti pasar membaca informasi ini sebagai sinyal tentang prospek arus kas dan struktur aset, bukan sekadar angka dekoratif (Gonçalves et al., 2017). Studi pada perusahaan agrikultur Indonesia menegaskan bahwa *fair value measurement* dan pengungkapan aset biologis yang memadai meningkatkan nilai perusahaan, sehingga informasi yang lebih akurat mengenai aset biologis termasuk klasifikasinya sebagai aset lancar atau tidak lancar mempengaruhi bagaimana investor dan kreditur memandang risiko dan potensi entitas (Alfarisyi et al., 2022).

Dengan latar belakang tersebut, Tabel 4 merangkum dampak kuantitatif dari variasi klasifikasi terhadap rasio keuangan vital pada tiga BUMDes hipotesis yang secara ekonomi identik.

**Tabel 4. Distorsi Rasio Keuangan Akibat Variasi Klasifikasi**

Indikator Keuangan	Skenario A (Klasifikasi Persediaan)	Skenario B (Klasifikasi Aset Tetap)	Skenario C (Tepat/PSAK 241)	Dampak Varians
<i>Current Ratio</i>	1,68x (Sangat Sehat)	0,94x (Kritis/Illiquid)	1,15x (Moderat)	Penilaian likuiditas bertolak belakang
<i>Quick Ratio</i>	1,15x	0,62x	0,75x	Persepsi kemampuan bayar cepat terdistorsi
Modal Kerja Bersih	Rp 420 Juta	Rp 100 Juta	Rp 150 Juta	Selisih persepsi dana operasional > 300%
Intensitas Aset Tetap	40%	70%	Proporsional	Kesalahan penilaian struktur modal

### Sumber : Hasil data olahan simulasi penulis

Pengambilan keputusan kredit. Seorang kreditur yang menganalisis BUMDes A berpotensi menyetujui pinjaman karena *current ratio* 1,68x dan *quick ratio* 1,15x secara konvensional dibaca sebagai profil likuiditas yang sangat sehat, sejalan

dengan temuan bahwa rasio likuiditas tinggi sering diasosiasikan dengan risiko gagal bayar yang lebih rendah (Prakoso et al., 2024). Sebaliknya, petugas yang sama kemungkinan menolak pengajuan kredit BUMDes B karena *current ratio* 0,94x dan *quick ratio* 0,62x berada di bawah ambang batas konservatif, meskipun secara fundamental kedua BUMDes memiliki kas, jumlah ternak, dan kapasitas produksi yang identik. Di sisi lain, intensitas aset tetap BUMDes B yang mencapai 70% dapat ditafsirkan sebagai struktur yang sangat padat modal dan berisiko likuiditas tinggi, padahal sebagian aset tersebut secara ekonomi siap dijual dalam jangka pendek. Kondisi ini menunjukkan bahwa di bawah pendekatan Kepmendesa 136/2022, akses permodalan sering kali tidak ditentukan oleh kesehatan bisnis yang sesungguhnya, tetapi oleh cara aset biologis diklasifikasikan di neraca.

### Pengakuan Perubahan Nilai Biologis (*Value Change Recognition*)

Dalam kerangka Kepmendesa 136/2022 yang mengadopsi SAK ETAP, tidak terdapat pengaturan khusus mengenai pengakuan perubahan nilai aset biologis (*value change recognition*), sehingga pengukuran secara implisit mengikuti model biaya historis. Akibatnya, laba atau rugi atas aset biologis baru diakui pada saat realisasi seperti penjualan atau panen, bukan selama proses transformasi biologis berlangsung (ICAEW, 2018).

IAI dalam PSAK 241 (2024) paragraf 12 menjelaskan bahwa aset biologis diukur pada saat pengakuan awal dan pada setiap akhir periode pelaporan pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual (*fair value less cost to sell*). Pendekatan pengukuran nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dengan pengakuan langsung laba/rugi pada setiap akhir periode pelaporan memastikan bahwa kinerja ekonomi aset biologis tercermin secara lebih relevan dan tepat waktu serta mengakomodir seluruh perubahan nilai ekonomi, sehingga memberikan informasi yang tepat waktu bagi para pengambil keputusan.

Entitas dapat menyajikan perubahan jumlah tercatat aset biologis antara awal dan akhir periode berjalan yang mencakup keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, kenaikan karena pembelian, penurunan yang didistribusikan pada penjualan dan aset biologis yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual, penurunan karena panen, dan perubahan lain.

### Ilustrasi Dampak Kuantitatif pada Laporan Keuangan

Dengan skema simulasi pada Tabel 5, pendekatan berbasis biaya historis hanya akan mengakui beban depresiasi tetap setiap tahun atas kawanan sapi tersebut, sehingga keuntungan atau kerugian akibat perubahan nilai wajar tidak pernah terlihat sampai saat penjualan sapi dilakukan. Sebaliknya, jika menggunakan pendekatan dengan nilai wajar, BUMDes A akan mengukur kembali kawanan sapi pada nilai wajar di setiap akhir tahun. Selisih antara nilai wajar baru dan nilai tercatat sebelumnya diakui sebagai laba atau rugi periode berjalan. Dengan demikian, selama 2024–2027 laporan keuangan BUMDes A dengan pendekatan nilai wajar akan menunjukkan pola laba yang mengikuti dinamika pertumbuhan, wabah penyakit, pemulihan, dan penjualan sapi. Sementara jika dengan pendekatan biaya historis pola labanya cenderung tidak merata dan fluktuatif karena menunda pengakuan kinerja atau laba hingga saat penjualan.

**Tabel 5. Simulasi dampak *Value Change Recognition* Kepmendesa 136/2022 versus PSAK 241**

Metrik Keuangan	Kepmendesa 136/2022	PSAK 241	Selisih Pencatatan	Dampak
<i>Skema Simulasi Tahun-1: Perolehan Aset Biologis dan Pengakuan Akhir Tahun</i>				
Aset Biologis (Saldo Awal Tahun)	Rp 500 Juta	Rp 500 Juta	-	-
Akumulasi Depresiasi (Tahun-1)	Rp 83.3 Juta	-	(Rp 83.3 Juta)	<i>Carrying amount understated</i>
<i>Fair value Adjustmen</i>	-	Rp 140 Juta	(Rp 140 Juta)	<i>Unrecognized Holding</i>

<i>t Gain</i>		<i>Gains</i>		
<i>Skema Simulasi Tahun-2: Penurunan jumlah ternak sapi sejumlah 10% dikarenakan wabah, harga pasar turun sebesar 5%, biaya pakan dan perawatan sebesar Rp 110 Juta</i>				
Akumulasi Depresiasi (Tahun-2)	Rp 83,3 Juta	-	(Rp 83,3 Juta)	<i>Carrying amount understated</i>
<i>Fair value Adjustmen t Gain</i>	-	(Rp 64 Juta) + (Rp 32 Juta) + (Rp110 Juta) = (Rp 206 Juta)	(Rp 206 Juta)	<i>Unrecognized Holding Loss</i>
Aset Biologis Bersih (Saldo Akhir Tahun)	Rp 333,4 Juta	Rp 434 Juta	Rp 100,6 Juta	<i>Total Assets Materially Understated</i>
<i>Skema Simulasi Tahun-3: Harga pasar kembali normal, biaya pakan dan perawatan sebesar Rp 110 Juta</i>				
Akumulasi Depresiasi (Tahun-3)	Rp 83,3 Juta	-	(Rp 83,3 Juta)	<i>Carrying amount understated</i>
<i>Fair value Adjustmen t Gain</i>	-	(Rp110 Juta)	(Rp110 Juta)	<i>Unrecognized Holding Loss</i>
Aset Biologis Bersih (Saldo Akhir Tahun)	Rp 250,1 Juta	Rp 324 Juta	Rp 73,9 Juta	<i>Total Assets Materially Understated</i>
<i>Skema Simulasi Tahun-4: Sapi dijual seluruhnya dengan harga total Rp 700 Juta</i>				
Aset Biologis Bersih (Saldo Akhir Tahun)	Rp 250,1 Juta	Rp 324 Juta	Rp 73,9 Juta	<i>Total Assets Materially Understated</i>
Penjualan	Rp 700 Juta	Rp 700 Juta		
Pengakuan Laba Bersih	Rp 449,9 Juta	Rp 376 Juta		<i>Financial Performance Materially Misstated</i>

**Sumber : Hasil data olahan simulasi penulis**

Simulasi tahun ke-4 menunjukkan biaya historis menunda pengakuan kenaikan nilai hingga penjualan, sehingga laba melonjak tajam. Sebaliknya, PSAK 241 menyebarkan laba sepanjang umur aset, menghasilkan kinerja lebih stabil. Perbedaan ini menimbulkan distorsi persepsi, karena laba tampak lebih tinggi meski kondisi ekonomi sebenarnya sama.

**Kerangka Pengungkapan Aset Biologis**

Dalam Kepmendesa 136/2022 Bab II.F.4, pengungkapan difokuskan pada aset tetap, meliputi dasar pengukuran, metode dan tarif penyusutan, umur manfaat, nilai tercatat, akumulasi penyusutan, serta rekonsiliasi saldo. Karena tidak ada aturan khusus aset

biologis, BUMDes cenderung memperlakukannya sebagai aset tetap. Akibatnya, aset biologis seperti sapi perah diungkapkan dengan basis biaya historis dan penyusutan, meski karakter ekonominya berbeda. Contohnya, BUMDes X melaporkan 100 ekor sapi senilai Rp500 juta dengan akumulasi depresiasi Rp83 juta.

Sebaliknya, PSAK 241 mensyaratkan pengungkapan lebih komprehensif, termasuk keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar. Aset biologis diklasifikasikan berdasarkan jenis dan tingkat kematangan untuk meningkatkan relevansi informasi. Contoh BUMDes A menunjukkan nilai wajar meningkat dari Rp500 juta menjadi Rp585 juta akibat faktor biologis dan harga pasar. Pendekatan ini memberikan gambaran lebih transparan mengenai kinerja dan potensi arus kas masa depan

**PEMBAHASAN**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan normatif antara Kepmendesa 136/2022 (SAK ETAP historical approach) dengan PSAK 241 (*fair value* aset biologis) dan dampaknya terhadap kualitas pelaporan BUMDes. Pendekatan historis terbukti menimbulkan *undervaluation* aset biologis, distorsi rasio profitabilitas seperti ROA, serta menghasilkan *current ratio* yang ekstrem sehingga mengurangi kemampuan laporan keuangan dalam merefleksikan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Selain itu, kegagalan pendekatan historis dalam menangkap dinamika transformasi biologis aset menyebabkan penurunan relevansi informasi laporan keuangan bagi pengambilan keputusan ekonomi.

Hasil kajian juga menunjukkan bahwa pendekatan nilai wajar sesuai PSAK 241 lebih mampu merefleksikan perubahan nilai aset biologis baik dalam skenario pertumbuhan maupun krisis, sehingga meningkatkan kualitas pelaporan keuangan BUMDes. Perbedaan perlakuan akuntansi antara Kepmendesa 136/2022 dan PSAK 241 tidak hanya bersifat teknis, tetapi

berdampak langsung pada pengukuran kinerja, posisi keuangan, serta persepsi risiko dan keberlanjutan usaha BUMDes. Dengan demikian, diperlukan harmonisasi regulasi agar pelaporan keuangan BUMDes selaras dengan substansi ekonomi aset biologis yang dikelolanya.

Implikasi praktis dari hasil penelitian ini dapat digunakan agar regulator (Kementerian Desa dan pemangku kepentingan terkait) meninjau kembali ketentuan Kepmendesa 136/2022, khususnya terkait perlakuan akuntansi aset biologis, dan mengintegrasikan prinsip-prinsip PSAK 241 ke dalam pedoman akuntansi BUMDes. Regulator juga perlu menyusun panduan teknis dan contoh praktis (*implementation guidance*) bagi BUMDes yang memiliki aset biologis, termasuk ilustrasi pengukuran nilai wajar, pengakuan laba/rugi perubahan nilai, serta pengungkapan yang memadai. Selain itu, BUMDes didorong untuk meningkatkan kapasitas akuntansi dan pemahaman manajerial mengenai karakteristik aset biologis, melalui pelatihan, pendampingan, dan kerja sama dengan akuntan publik atau akademisi agar transisi menuju pendekatan nilai wajar dapat dilakukan secara bertahap dan terkontrol.

## SIMPULAN

Penggunaan pendekatan historis berdasarkan Kepmendesa 136/2022 pada aset biologis BUMDes menimbulkan kesenjangan normatif signifikan dibandingkan PSAK 241, mengakibatkan *undervaluation*, distorsi rasio keuangan, dan penurunan relevansi laporan keuangan. Pendekatan nilai wajar PSAK 241 terbukti superior dalam merefleksikan dinamika aset biologis, sehingga diperlukan harmonisasi regulasi untuk meningkatkan kualitas pelaporan BUMDes.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena analisis terutama didasarkan pada studi dokumen dan simulasi kuantitatif, sehingga belum sepenuhnya merepresentasikan praktik akuntansi aset biologis BUMDes di lapangan. Selain itu, asumsi dalam skenario pertumbuhan dan krisis belum mencakup seluruh variasi karakteristik aset biologis dan

kondisi operasional BUMDes. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan pengujian empiris pada berbagai tipe BUMDes serta mengembangkan model pelaporan aset biologis berbasis PSAK 241 yang mempertimbangkan keterbatasan kapasitas SDM dan sistem akuntansi desa.

Hasil dan rekomendasi penelitian ini sebaiknya dipandang sebagai dasar konseptual dan teknis awal yang masih memerlukan pengujian empiris dan pengayaan lebih lanjut melalui studi di berbagai konteks BUMDes. Penelitian lanjutan dapat mengembangkan model atau *template* pelaporan keuangan spesifik BUMDes berbasis PSAK 241 yang tetap mempertimbangkan keterbatasan kapasitas SDM dan infrastruktur akuntansi di desa, sehingga rekomendasi regulasi tidak hanya konseptual tetapi juga operasional dan implementatif.

## DAFTAR RUJUKAN

- Aji, D. A. S. (2023). Analisis Penerapan Akuntansi Aset Biologi PSAK 69 di PT Sampoerna Agro Tbk. *Politeknik LPP Yogyakarta*.
- Alfarisyi, N., Diantimala, Y., Yahya, R., & Saleh, M. (2022). Biological Assets and Firm Value: Do *Fair value* Measurement and Disclosure Matter? *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 9(2), 205–222.  
<https://doi.org/10.24815/jdab.v9i2.24694>
- Anggorowati, C., Herwiyanti, E., & Widianingsi, R. (2017). Analisis Pengakuan dan Pengukuran Aset Biologis Perusahaan Perkebunan dengan Pendekatan Nilai Wajar dan Nilai Historis. *Simposium Nasional Akuntansi XX*.
- Baroroh, N., Yanto, H., Fajarrini, I., & Agustina, L. (2018). Accounting of Biological Assets in Indonesian Plantation Companies. *KnE Social Sciences*, 3(10), 46.  
<https://doi.org/10.18502/kss.v3i10.3117>

- Bibiana, R. P., Manehat, B. Y., Imuneno, A. Y. W., Hermanus, E. P. B., & Ndun, M. A. V. (2022). Memotret Akuntansi Aset Biologis Pada Kelompok Tani (Studi Pada Kelompok Tani Terbit Baru Dan Kelompok Tani Ps4 Abdi Laboratus-Ntt). *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 10(2), 157–172. <https://doi.org/10.21067/jrma.v10i2.6848>
- Bohusova, H., & Svoboda, P. (2017). Will the amendments to the IAS 16 and IAS 41 influence the value of biological assets? *Agricultural Economics (Czech Republic)*, 63(2), 53–64. <https://doi.org/10.17221/314/2015-AGRICECON>
- Campos Llerena, L. P., Arias Pérez, M. G., Vayas López, Á. H., & Barreno Córdova, C. A. (2025). Valuation of biological assets and reasonableness of financial information: a systematic review of empirical evidence in the agricultural sector. *Sapienza*, 6(3). <https://doi.org/10.51798/sijis.v6i3.1105>
- Cavalheiro, R. T., Gimenes, R. M. T., Binotto, E., & Fietz, C. R. (2019). *Fair value of Biological Assets: An Interdisciplinary Methodological Proposal*. *Revista de Administracao Contemporanea*, 23(4), 543–563. <https://doi.org/10.1590/1982-7849rac2019180254>
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan. (2022). *PSAK 113 tentang Pengukuran Nilai Wajar*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan. (2024). *PSAK 241 tentang Agrikultur*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Gonçalves, R., Lopes, P., & Craig, R. (2017). Value relevance of biological assets under IFRS. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 29, 118–126. <https://doi.org/10.1016/j.intaccudtax.2017.10.001>
- I Gusti Ketut Agung Ulupui, Argie Destri Rahmani, Dwi Handarini, & Hafifah Nasution. (2021). Perbandingan Perlakuan Akuntansi Aset Biologis Berdasarkan PSAK 16 dan PSAK 69 Pada Perusahaan Agrikultur. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 99–115. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v4i1.84>
- International Accounting Standards Board. (2021). *IAS 41 Agriculture*. London: IFRS Foundation.
- Icaew Thought Leadership Information For Better Markets. (2006) *Measurement in financial reporting*. [www.icaew.co.uk/bettermarkets](http://www.icaew.co.uk/bettermarkets).
- Kemendes PDTT. (2022). *Keputusan Menteri Desa Nomor 136 Tahun 2022 tentang Panduan Penyusunan Laporan Keuangan BUMDes*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- Prakoso, N. A., Harahap, M. N., & Nasution, R. (n.d.). Effect Of Current Ratio, Debt-To-Equity Ratio, Return On Assets, And Company Size On The Risk Of Business Failure (Empirical Study Of Food And Beverage Companies Listed On The Indonesia Stock Exchange In 2019-2021). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Februari*, 2024(3), 552–568. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10642592>
- Rachmawati, Y., Oktariyani, A., & Ermina. (2019). Implementasi Perlakuan Akuntansi Aset Biologis Berbasis PSAK 69 yang Berlaku Efektif 1 Januari 2018 pada Perusahaan Perkebunan (Studi Kasus PT PP London Sumatera Indonesia, Tbk). *Akuntansi Dan Manajemen*, 14(2), 130–145.
- Stárová, M., Čermáková, H., Hlavsa, T., Vostrovská, H., & Levá, M. (2016).

- Evaluation of applicability of IAS 41 - Agriculture to the valuation of growing forest stands and their accounting treatment in the Czech Republic. *Journal of Forest Science*, 62(9), 429–440.  
<https://doi.org/10.17221/59/2016-JFS>
- Anas, M., Setiawan, H., Tinggi, S., Ekonomi, I., & Malang, A. (2016). The Implementation Of *Fair Value* On Short Term Assesment Of Biological Assets. In *Journal of Accounting and Business Education* (Vol. 1, Issue 1).
- Batubara, R. (2019). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Biologis Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Psak) No. 69 Tentang Agrikultur Pada Pt. Perkebunan Nusantara Iii Medan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Kontemporer*, 2.
- Budiaman, H., & Mulyanti, D. (2021). *Revitalisasi Badan Usaha Milik Desa Dalam Menggali Potensi Lokal Desa*.
- Fajar, A. (2024). *Analisis Faktor Daya Dukung Dalam Membangun Konsep Pariwisata Berkelanjutan Di Geopark Ciletuh-Palabuhanratu*.
- Gusti, I., Pramitari, A. A., Nurhayanti, K., Putu, S. L., Suningsih, Y., Akuntansi, J., & Bali, N. (2020). *Penerapan Sak Etap Pada Unit Jasa Pengelolaan Sampah Bumdes Desa Buduk*. 6(2).
- Mauldyda, T., Ningsih, H., & Wibowo, D. (2022). *Implementasi Penerapan Psak 241 Atas Aset Biologis Di Safwana Koi Farm*.  
[www.kominfo.jatimprov.go.id](http://www.kominfo.jatimprov.go.id).
- Mayasari, V. F., & Sesung, R. (2025). Analisis Kepailitan PT Sritex Berdasarkan Faktor Penyebab Dampak dan Mitigasi Hukum. In *Journal Evidence Of Law* (Vol. 4, Issue 2).  
<https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL>
- Putra, R., & Fitriani, R. (2023). Evaluasi Pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) “Sumber Rejeki.” In *Journal Of Applied Managerial Accounting* (Vol. 7).
- Putri, V. A., Andari, A. T., Fitriani, D. R., & Malang, P. N. (2024). *Analysis of Biological Assets Measurement and Treatment by Using Fair value and Historical cost Approaches on Plantatiton Entities Based on PSAK 69 (Study in PT Dewi Sri)*.
- Koesnyawati, K. K., & Syurmita (2023). Analisis Pendekatan Nilai Wajar Dan Nilai Historis Dalam Mengukur Aset Biologis Perusahaan Perkebunan Di Indonesia, Singapura, Dan Malaysia. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi* (Vol. 7, No. 1).
- Sulistiyowati, E., Kristiawan, A., Setyawardani, L., Dewi, M. A., & Nugraheni, R. (2024). Kebijakan Pengelolaan Keuangan Dan Akuntabilitas Pelaporan Dalam Upaya Penyusunan Laporan Keuangan BUMDes Sesuai SAK ETAP. *Owner*, 8(4), 4798–4807.  
<https://doi.org/10.33395/owner.v8i4.2399>